

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Kediri tahun 2016, dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan hingga tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Pada tahun 2016 Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kota Kediri disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sehingga diharapkan pembangunan berjalan selaras dan dapat mencapai target pembangunan nasional secara keseluruhan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah :

"Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk meletakkan fondasi Pembangunan yang berkualitas"

Adapun kebijakan pembangunan nasional tahun 2016 sejalan dengan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan atau Nawa Cita, antara lain:

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan sosial untuk rakyat.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional pada tahun 2016, Propinsi Jawa Timur telah menetapkan tema RKPD, yaitu **Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015**, dengan didukung beberapa isu strategis, antara lain :

1. Peningkatan Produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan Investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha (Investasi);
5. Peningkatan porsi belanja pemerintah daerah untuk menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai listrik;

Untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri menetapkan beberapa Prioritas pembangunan pada Tahun 2016, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;
3. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan berbasis Ekologi;
4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

5. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan;
6. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan;
7. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan;
8. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;
9. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2016, merupakan gambaran pembangunan tahun 2016 yang terkait dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kediri tahun 2014 -2019, yaitu :

4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Kota Kediri akan melakukan penataan struktur kelembagaan. Hingga saat ini masih dilakukan secara parsial karena terkendala regulasi yang mengatur mengenai kelembagaan atau organisasi perangkat daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Kediri ke depan adalah membangun dan menata pemerintahan daerah tanpa korupsi. Hal itu akan diawali dengan membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengoptimalkan pengembangan *e-government*. Kemudian, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

4.1.2 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur selalu menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pemerintah Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar.

Infrastruktur dasar masyarakat meliputi ketersediaan infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik dan dan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pengembangan prasarana transportasi khususnya jalan dan jembatan merupakan tantangan penting karena dari prasarana transportasi inilah akan terjamin kelancaran pendistribusian barang dan jasa

4.1.3 Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan berbasis Ekologi

Dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan aktivitas manusia dan perubahan iklim adalah hilang atau tidak berfungsinya sumber mata air, kekeringan di musim kemarau dan longsor/banjir di musim hujan. Kualitas air sungai juga telah mengalami pencemaran dari akibat limbah domestik dan limbah industri. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih terus menjadi isu sentral, misalnya penurunan kondisi lingkungan hidup berupa pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan SDA, dan bencana lingkungan. Pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dilakukan pada wilayah dengan kapasitas daya dukung lingkungan yang cukup hingga baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penataan ruang yang baik, rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup, serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Aspek pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan oleh semua SKPD pada semua sektor pembangunan. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup oleh berbagai SKPD, mulai penyusunan peraturan, implementasinya secara teknis, hingga pengawasan dan evaluasi. Selama ini proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan untuk dapat lebih memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.

4.1.4 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masyarakat Kota Kediri adalah masyarakat yang sangat majemuk dari sisi keagamaan. Kemajemukan ini merupakan kekuatan yang dapat mendukung pembangunan dan mendorong investasi di Kota Kediri, namun di sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan kesenjangan beragama dan dapat menghambat kemajuan kota. Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Chu dan penghayat aliran kepercayaan lain berbaur di Kota Kediri, namun kondisi daerah tetap aman dan terkendali. Tidak ada konflik dalam menjalankan aktivitas keagamaan, bahkan untuk agama Islam, Kota Kediri merupakan pusat kajian pendidikan agama Islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari para tokoh dan pemuka agama untuk bersatu padu membina kerukunan antar umat beragama yang terakumulasi dalam forum-forum keagamaan seperti Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (PAUB), Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) dan forum-forum lainnya yang secara rutin mengadakan koordinasi dan pertemuan untuk tetap terbina kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing-masing pemeluknya. Stabilitas keamanan dan ketertiban yang relatif baik dan terjaga, yang tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang berbau SARA dan yang menimbulkan kerusuhan massal. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ke depan Pemerintah Kota Kediri akan memberdayakan organisasi keagamaan dan meningkatkan sarana prasarana ibadah; bantuan untuk sarana dan prasarana ibadah, seperti: Masjid, Musholla, Gereja, Klenteng dan sebagainya.

4.1.5 Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan

Pekerjaan dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dan meningkatkan kehidupannya. Lapangan pekerjaan yang cukup akan mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan kemakmuran semakin meningkat dan angka kemiskinan dapat semakin ditekan. Prioritas agenda program ini yaitu penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan jumlah wirausahawan mandiri,

dan adanya bursa kerja yang dilaksanakan sampai tingkat Kelurahan sehingga memperluas dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi lowongan kerja. Regulasi dan fasilitasi program perlindungan tenaga kerja direalisasikan melalui asuransi, pemberian kepastian upah minimum kota, serta penciptaan kondisi terjalannya hubungan kerja kondusif yang sangat diperlukan guna meningkatkan keamanan dan kesejahteraan tenaga kerja.

4.1.6 Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memegang prinsip merata dan berkeadilan adalah hal yang seharusnya ada di setiap wilayah. Untuk meningkatkan hal tersebut maka perlu untuk : peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus yang diharapkan pada gilirannya nanti, masyarakat memiliki kualitas hidup yang sehat dan produktifitas yang tinggi. Guna memenuhi tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, prioritas agenda program kesehatan harus didukung ketersediaan dokter spesialis di setiap unit layanan kesehatan maupun dalam suatu besaran wilayah dan jumlah penduduk tertentu. Didukung juga dengan sarana prasarana yang memadai di puskesmas, pustu, dan poskeskel. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah juga harus ditingkatkan dengan ditunjang memadainya bangunan dan fasilitas di rumah sakit umum daerah (RSUD), kecukupan tenaga paramedis dan tenaga medis spesialis di RSUD.

4.1.7 Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan

Penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah yang mampu memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Masih banyak terjadi disparitas kualitas sekolah, dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, serta meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik, perlu adanya restrukturisasi manajemen sekolah dengan merotasi dan

memutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga diharapkan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pelayanan pendidikan antara lembaga pendidikan di Kota Kediri.

Dengan berkurangnya ketimpangan kualitas pendidikan antar lembaga sekolah, maka para siswa dapat mengakses pendidikan yang berkualitas merata dalam setiap lembaga pendidikan yang ada di Kota Kediri.

4.1.8 Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), sudah berjalan mulai tahun 2015, pada Prodamas ini RT dan RW didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Pada tahun 2016 ini diharapkan bisa terjadi interaksi lebih baik lagi, sehingga alokasi anggaran sebesar 50 juta rupiah tiap tahun dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh warga masyarakat.

Program ini diusulkan dan dibahas melalui mekanisme Musrenbang tingkat kelurahan.

4.1.9 Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya

Pelestarian Beragam kelompok seni dan budaya serta olahraga yang ada di Kota Kediri, serta organisasi organisasi wanita.

Pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga seni dan budaya sangat terkait dengan adanya organisasi-organisasi wanita, kepemudaan, olah raga, seni dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri perlu mendorong agar lebih aktif terlibat dalam organisasi-organisasi wanita, kepemudaan dan olahraga di wilayahnya. Kelompok-kelompok seni dan budaya yang beragam di Kota Kediri adalah pemberi warna kehidupan dan menjadi saksi sejarah budaya yang pernah ada. Untuk itu, pelestarian aset-aset seni dan budaya yang ada di Kota Kediri menjadi salah satu prioritas agenda program Pemerintah Daerah yang diharapkan membawa keseimbangan dan harmonisasi antara pembangunan fisik dan pembangunan batin masyarakat.